

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN WISATA PANTAI  
CEMARA GAMPONG LINGKA KUTA KECAMATAN GANDAPURA  
KABUPATEN BIREUEN**

**Zahra Tunnisak<sup>1</sup>, Teuku Alfiady<sup>2</sup>,**

<sup>1,2</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe,  
Aceh, Indonesia

Email: zahra.200210025@mhs.unimal.ac.id

**Abstract**

This study aims to analyze the implementation of the tourism management policy at Cemara Beach in Lingka Kuta Village, Gandapura District, Bireuen Regency. The research focuses on four key dimensions: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure based on the policy implementation model proposed by George C. Edwards III. A qualitative descriptive approach was applied, with data collected through interviews, observations, and documentation involving village officials, tourism managers, and local community members. The findings reveal that the implementation of the Cemara Beach tourism management policy has not yet been fully effective. In terms of communication, there remains a gap in coordination between village authorities and tourism managers; in the resource aspect, limited funding and inadequate infrastructure remain major constraints. Meanwhile, the disposition aspect shows a relatively high commitment among managers, although coordination with local government agencies remains weak. The bureaucratic structure is still simple and lacks an integrated operational mechanism. Overall, this study highlights that the effectiveness of tourism policy implementation at Cemara Beach requires improved interagency communication, adequate resource support, and strengthened institutional capacity for sustainable community-based tourism management.

**Keywords:** *Policy Implementation, Tourism Management, Cemara Beach, Lingka Kuta Village, Bireuen*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan wisata Pantai Cemara di Gampong Lingka Kuta, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen. Fokus penelitian diarahkan pada empat aspek utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sesuai model implementasi kebijakan dari George C. Edwards III. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap aparat pemerintah gampong, pengelola wisata, dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan wisata Pantai Cemara belum berjalan optimal. Dari aspek komunikasi, masih terdapat kesenjangan informasi antara pemerintah gampong dan pengelola wisata; pada aspek sumber daya, keterbatasan dana dan sarana prasarana menjadi kendala utama. Sementara itu, aspek disposisi menunjukkan adanya komitmen pengelola yang cukup tinggi, namun belum didukung koordinasi yang kuat dengan pihak pemerintah daerah. Struktur birokrasi juga masih bersifat sederhana dan belum memiliki mekanisme kerja yang terintegrasi. Secara keseluruhan, penelitian

ini menegaskan bahwa efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan wisata Pantai Cemara memerlukan peningkatan komunikasi antarpihak, dukungan sumber daya memadai, serta penguatan kelembagaan desa wisata agar pengelolaan dapat berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Wisata, Pantai Cemara, Gampong Lingka Kuta, Bireuen

## A. PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan memperluas pendapatan masyarakat. Pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan nasional terus berupaya mendorong pengembangan destinasi wisata berbasis potensi lokal agar mampu bersaing di tingkat nasional dan global. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menegaskan bahwa pengembangan pariwisata harus memperhatikan nilai-nilai budaya, kearifan lokal, serta kelestarian lingkungan.

Implementasi kebijakan merupakan salah satu langkah penting dalam struktur pemerintahan dan penyelenggaraan negara yang melibatkan pelaksanaan keputusan dasar yang telah dibuat, seringkali dalam bentuk undang-undang. Namun, tidak jarang kebijakan juga dibuat dalam bentuk keputusan eksekutif yang signifikan atau perintah. Proses implementasi sangat penting untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam mewujudkan visi dan misi kebijakan. Sukses dalam menerapkan kebijakan memerlukan struktur yang jelas dan mekanisme pengaturan yang baik untuk memberikan dampak positif dan memberdayakan masyarakat secara optimal (Nurkholis, 2007).

Pemerintah terus menjalankan berbagai kebijakan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi, menangani ketimpangan wilayah, serta mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional untuk sekarang dan masa depan. Salah satu kebijakan utama yang menjadi dasar dalam pembangunan ekonomi berbasis pengembangan wilayah, khususnya transformasi infrastruktur adalah prioritas program/proyek infrastruktur yakni melalui Proyek Strategis Nasional (PSN).

Pembangunan Nasional yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan telah berhasil memperbaiki kondisi perekonomian, baik dalam skala regional maupun nasional. Perbaikan kondisi perekonomian tersebut dapat ditempuh dengan jalan memanfaatkan sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia. Sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan, karena sumber daya manusia yang rendah menjadikan kondisi masyarakat kurang mampu dalam melihat serta mengatasi masalah hidupnya, yang kemudian akan berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran. Oleh karena itu usaha pengembangan sumber daya manusia merupakan hal yang harus dan perlu dilakukan.

Pengembangan wisata berkelanjutan dengan perawatan yang baik terhadap Pantai cemara dan manajemen yang efektif oleh BUMG, Pantai cemara dijadikan objek wisata yang menarik, pengelolaan yang baik ini membawa dampak positif pada citra dan keberlanjutan lingkungan. Sinergi dengan kebijakan pusat keterlibatan Meteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi (Mendes PD TT) dalam meresmikan desa wisata menunjukkan dukungan pemerintah pusat terhadap Pembangunan lokal. Dengan menjaga kualitas pengelolaan, pantai cemara memiliki potensi yang menjadi asset ekonomi yang berkelanjutan bagi desa, memberikan contoh positif untuk pengembangan destinasi wisata lainnya, serta memperkuat implementasi kebijakan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal.

Dalam konteks Aceh, pengelolaan wisata tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga harus sejalan dengan nilai-nilai keislaman yang menjadi landasan kehidupan masyarakat (Husni, 2024). Kemudian, Kearifan lokal berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara nilai budaya, agama, dan pembangunan ekonomi daerah (Rijal & Sandra, 2022). Aceh sebagai salah satu daerah otonomi khusus yang memiliki anggaran yang cukup besar dibandingkan dengan daerah lainnya membuat pemerintah daerah Aceh lebih banyak memiliki program yang bermanfaat untuk membantu mengentaskan kemiskinan dengan berbagai macam program unggulan. Salah satu program unggulan pemerintah Aceh adalah “Desa Wisata” Sejalan dengan tujuan pembangunan kepariwisataan, Pemerintah mengembangkan desa wisata yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, serta memajukan kebudayaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah memiliki otonomi untuk mengatur dan mengelola daerah melalui hal-hal yang berkaitan dengan pariwisata. Dengan otonomi ini, penyelenggara pariwisata dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk mengembangkan pariwisata untuk menguntungkan semua pihak.

Berdasarkan Peraturan Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 3 Tentang Pengembangan Desa wisata juga merupakan salah satu bentuk percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya, dan ekonomi desa. Karena itu, tiap daerah dan desa perlu mencermati potensi yang dimilikinya untuk diangkat dan dikembangkan agar memberikan nilai tambah manfaat serta menghasilkan produktivitas yang tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Dalam Peraturan Bupati Bireuen Nomor 10 Tahun 2021 tentang Objek Daya Tarik Wisata Kabupaten Bireuen dalam Bab V Pasal 6 Ayat 4 dan 6 mengenai sarana dan prasarana dan juga mengenai pengelolaan kawasan wisata yang memenuhi standar keamanan pada objek wisata. Apalagi Desa Linggakuta

diresmikan sebagai salah satu Desa Wisata di Bireuen oleh Menteri Desa. Pada hari sabtu tanggal 5 Agustus 2023. Lokasi objek wisata Pantai ini hanya sekitar 1,5 Km dari arah utara keude Geureugok, Ibu kota kecamatan Gandapura, Kabupaten bireuen. Lokasinya yang cukup strategis, wisatawan lokal relatif tinggi untuk saat ini terutama di daerah Bireuen.

Berdasarkan Buku Pedoman Desa Wisata Kementrian parawisata Tahun 2019, Desa Wisata merupakan suatu bentuk penyesuaian antara akomodasi, atraksi dan fasilitas pendukung lainnya yang disajikan pada suatu struktur yang menyatu dengan kehidupan masyarakat setempat. Oleh karenanya, Desa Wisata harus memiliki konsep yang matang agar menarik untuk dikunjungi wisatawan. Konsep dari Desa Wisata adalah dengan menjadi desa sebagai tujuan wisata. Dengan cara memadukan daya tarik wisata alam dan budaya, layanan fasilitas umum pariwisata, serta aksesibilitas yang memadai, dengan tata cara dan budaya dari desa tersebut. Prinsip utama dari desa wisata dengan fokus kepada pemberdayaan masyarakat untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui pengembangan potensi wisata setempat.

Berdasarkan observasi awal melalui pengamatan langsung, peneliti menemukan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan wisata di Lingka Kuta, Kabupaten Bireuen, yang dimana sudah terlihat bahwa dengan berhasilnya resmi menjadi Desa Wisata. Berkat bantuan Keuchik dan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dalam membangun dan memelihara Pantai Cemara memberikan dampak positif, dimana dampak positif tersebut mulai dari pengangguran-pengangguran hingga pertumbuhan ekonomi yang sudah meningkat, tetapi masih ada permasalahan dalam komunikasi di desa tersebut.

Diharapkan bahwa besarnya pengaruh pariwisata terhadap masyarakat akan membuat masyarakat lebih menyadari betapa pentingnya pertumbuhan pariwisata. Memiliki potensi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat karena interaksi langsung dengan pengunjung. Untuk menjamin keamanan pengunjung, masyarakat perlu memperhatikan kebersihan lingkungan, menjaga keindahan alam, dan memelihara ketertiban dengan tidak membuang sampah sembarangan. Selain itu, penting juga untuk menyediakan akses transportasi yang aman dan nyaman serta jalan yang baik menuju tempat wisata.

Berdasarkan pendataan penduduk kabupaten Bireuen Tahun 2023, jumlah penduduk sebanyak 441.895 jiwa dengan jumlah kunjungan yang meningkat:

**Tabel 1. Objek Wisata dan Jumlah Kunjungan dalam Tahun 2021-2023**

No	Objek Wisata	Jumlah Kunjungan
1	Cot Panglima	12.871
2	Krueng Simpo	28.776
3	Air Terjun Piramida	3.211

4	Makam Tun Sri Lanang	25.766
5	Pantai Krueng Juli Barat	21.299
6	Pantai Kuala Jangka	32.765
7	Pantai Reuleng Manyang	18.762
8	Rumah Tgk Awe Geutah	30.765
9	Pantai Peueneulot Baroh	12.877
10	Pantai Ujoeng Seuke	29.865
11	Batee Iliiek	37.654
12	Batee Krueng dan Tugu Perjuangan	3.792
13	PPI Peudada	23.547
14	Rumah Tgk Awe Geutah	22.217
15	Waduk Paya Laot	5.765
16	Pantai Ujong Blang	28.877
17	Pantai Cemara	38.765
18	Air Terjun Ceuraceuk	12.876
19	Air Terjun Ie Rhop	22.764
20	Pantai Kuala Pawoen	17.654
Total		430.868

*Sumber: Disporapar Bireuen, 2024*

Tabel 1.1 di atas, menjelaskan mengenai jumlah kunjungan wisatawan dalam 2 tahun terakhir di Kabupaten Bireuen, dimana jumlah yang paling banyak dikunjungi yaitu di Pantai Cemara, Batee Iliiek, Pantai Ujong Blang, dan juga wisata Krueng Simpo. Jumlah pengunjung di Pantai Cemara mencapai 38,765 wisatawan, kemudian dilanjutkan wisata Batee Iliiek mencapai 37,654 wisatawan, wisata Pantai Ujong Blang mencapai 28,877 wisatawan dan objek wisata terakhir dikunjungi yaitu Krueng Simpo sebanyak 28,776 wisatawan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara awal dengan bapak Surya Dharma S.H sebagai tokoh masyarakat, mengatakan bahwa dalam implementasi pengelolaan objek wisata Pantai Cemara yang menjadi masalah utama adalah komunikasi, dimana komunikasi antar aktor yang terlibat sangat diperlukan, nyatanya komunikasi yang dibangun belum cukup baik dan masih terdapat mis komunikasi antar aktor. Selanjutnya sumber daya seperti sumber daya manusia sangat diperlukan dalam pengelolaan objek wisata, tetapi sumber daya yang ada di

Pantai Cemara belum mencukupi untuk dapat membantu pengelolaan secara lanjut dan yang terakhir adalah birokrasi (Wawancara awal, 10 Oktober 2024).

Pantai Cemara dikelola oleh Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) yang notabene di isi oleh pemuda desa setempat. Selama menjadi destinasi wisata, para pemuda juga sudah mempunyai pekerjaan tetap sehingga mengurangi pengangguran di desa. Pemandangan pantai yang cukup indah ditambah pohon cemara yang dirawat dengan rapi, menjadikan objek wisata tersebut kian memukau para pengunjung. Sajian makanan dan minuman yang diperjual belikan, juga terbilang murah dan pastinya enak untuk dicicipi. Fenomenanya hadirnya wisata Pantai Cemara memberikan kemudahan pekerjaan bagi pemuda yang mengalami pengangguran, tidak hanya itu masyarakat yang sebelumnya berpendapatan rendah, setelah adanya Pantai Cemara dapat meningkatkan pendapatan mereka, meskipun hal tersebut tidak dirasakan oleh semua masyarakat lokal.

Namun dibalik fenomena yang terjadi setelah adanya pengelolaan wisata Pantai Cemara, juga terdapat berbagai permasalahan dalam bidang pengelolaan pariwisata seperti belum optimalnya pengelolaan daya tarik wisata dan masih kurang memadainya penyediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan promosi pariwisata. Hal ini tidak sejalan dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 10 Tahun 2021 Bab V Tentang Pengelolaan Kawasan Wisata dalam Pasal 6 Ayat 4 dimana pengelolaan kawasan wisata harus memenuhi standar keamanan, kesehatan dan kebersihan. Artinya pengelolaan wisata pantai cemara harus mempunyai standar keamanan baik keamanan bagi kendaraan (adanya parkir), kemudian pengelolaan pantai cemara juga harus memenuhi standar kebersihan, seperti sampah-sampah yang tidak dibuang sembarangan dan lainnya. Namun, kenyataannya pengelolaan kawasan wisata pantai cemara dalam hal kebersihan belum maksimal, dimana kebersihan masih sangat minim sekali, banyak sampah yang berserakan yang tidak dimasukkan kedalam tempatnya seperti sampah pampers, sampah botol plastik, dan ada juga sampah yang sudah berjatuh ke tambak udang milik masyarakat sekitar.

Kemudian dalam pasal 6 ayat 6 dimana kawasan wisata harus mempunyai sarana dan prasarana yang dibangun oleh pemerintah dengan pengelolannya yang harus disetujui dan disepakati oleh pemerintah melalui Disporapar. Seperti pembangunan jalan yang harus memadai. Namun, sampai saat ini masih terdapat jalan yang rusak dan tergenang air ketika hujan turun. Selanjutnya pembangunan MCK yang harus memenuhi standar kebersihan. Pembangunan pondok yang juga masih dibangun oleh pedagang di Pantai Cemara menggunakan biaya dari hasil pendapatan mereka. Namun, pengelolaan yang saat ini terjadi di pantai cemara yaitu tanpa sentuhan tangan Disporapar dan hanya di kelola oleh pihak BUMG tanpa diketahui dan diberitahukan pada pihak Disporapar.

Berdasarkan latar belakang diperlukan pengelolaan lingkungan yang sistematis oleh pemerintah desa. Mengingat hal tersebut, pengelolaan destinasi wisata dapat dikatakan sangat penting karena menyangkut perubahan keadaan saat

ini. Tanpa adanya pengelolaan tempat wisata, maka tidak akan ada pengembangan atau perubahan terhadap obyek tersebut. Jika dikelola dengan baik, sektor pariwisata dapat menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Model Implementasi**

Model Implementasi George C. Ewards III dalam Widodo (2010: 56), memberi kesimpulan pengertiannya bahwa Implementasi merupakan suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan. Kemudian dalam Eward III dalam Widodo (2010:96) mengemukakan 4(empat) faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur biroksi.

### **Penegelolaan Pariwisata**

Pengelolaan pariwisata didefenisikan sebagai strategi yang digunakan dan mengkoordinasi teknik yang tersedia untuk mengontrol dan mempengaruhi penawaran serta permintaan pengunjung untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Adanya efisiensi program pengembangan pariwisata karenaadanya konsultasi dan peran langsung masyarakat local yang lebih memahami karakteristik daerah tempat dikembangkan pariwisata program pengembangan pariwisata masyarakat yang dapat membantu memastikan tujuan pengembangan pariwisata ini bisa dicapai atau tidak dapat mendorong terciptanya program capacity building bagi masyarakat terkait pengetahuan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata menjamin masyarakat mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan penggunaan sumber daya. Yuliamir (2017:20) menjelaskan bahwa Pengelolaan pariwisata adalah suatu usaha yang dilakukan untuk memperbaiki dan mengembangkan suatu produk atau menambah jenis produk wisata tersebut.

## **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan pengelolaan wisata Pantai Cemara di Gampong Lingka Kuta, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menginterpretasikan fenomena sosial berdasarkan perspektif partisipan dan konteks lapangan yang sebenarnya (Creswell, 2018).

Lokasi penelitian ditetapkan di Gampong Lingka Kuta, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, yang merupakan wilayah dengan

potensi wisata pantai dan telah memiliki kebijakan pengelolaan wisata melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive, karena lokasi ini dianggap representatif dalam menggambarkan pelaksanaan kebijakan pengelolaan wisata berbasis masyarakat di tingkat desa.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat pemerintah gampong, pengelola wisata, tokoh masyarakat, dan pengunjung Pantai Cemara. Data sekunder diperoleh dari dokumen kebijakan desa, peraturan daerah, laporan kegiatan, serta literatur yang relevan dengan pengelolaan wisata berbasis masyarakat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara utama, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali pandangan dan pengalaman para informan mengenai pelaksanaan kebijakan. Observasi dilakukan dengan mengamati kondisi lapangan, termasuk sarana prasarana wisata, pola interaksi pengelola dan pengunjung, serta aktivitas ekonomi masyarakat. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data administratif, foto, dan arsip kebijakan desa.

Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang meliputi tiga tahap: (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan secara simultan sejak proses pengumpulan data hingga tahap penulisan hasil.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Implementasi Kebijakan pengelolaan Wisata di Pantai Cemara**

Pada dasarnya kegiatan pengelolaan potensi pariwisata seharusnya dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bireuen, demi mewujudkan pariwisata yang berdampak pada pengembangan ekonomi masyarakat. Bagian pengelolaan wisata memiliki peran dan kewajiban untuk mengakomodir sarana dan prasarana di seluruh obyek wisata dan usaha wisata yang terdapat di Kabupaten Bireuen, seperti penyediaan akses menuju obyek wisata, penyediaan toilet, penyediaan loket dan karcis retribusi masuk obyek wisata dan penyediaan tempat sampah yang memadai sehingga memengaruhi kenyamanan pengunjung. Bukan hanya dari sarana dan prasarana juga harus dilihat dari standar keamanan, kesehatan dan kebersihan. Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut ini:

##### **Sarana dan Prasarana**

Pengembangan pariwisata merupakan salah satu cara untuk mempromosikan objek destinasi wisata agar menjadi lebih berkembang sebagaimana visi dan misi. Berkembangnya suatu kawasan wisata tidak lepas dari

usaha yang dilakukan melalui kerjasama kepariwisataan, masyarakat, dan pemerintah. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam berwisata, tentunya adalah sarana dan prasarana pendukung wisata, pengunjung akan lebih nyaman dan lebih menikmati kegiatana berwisata apabila sarana dan prasarannya lengkap dan dapat digunakan dengan baik oleh pengunjung, untuk itu sarana dan prasarana dalam sebuah tempat pariwisata untuk pendukung wisata sangatlah penting.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai lebih memudahkan pihak pengelola untuk mengimplementasikan program yang sudah direncanakan. disamping itu sarana dan prasarana Berdasarkan hasil observasi dilapangan Sarana dan prasarana pada obyek wisata Pantai Cemara belum memadai. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Agustinus (2021) dimana, informasi menunjukkan bahwa pengunjung belum puas dengan pelayanan sarana prasarana yang ada di lokasi tersebut, dalam hal ini peran pengelola dalam mengelola wisata khususnya penataan di lokasi sarana dan prasarana belum baik dan memuaskan pelayanan pengunjung. Hal ini sejalan dengan penelitian Ripley dan Franklin dalam Winarno, (2016) dimana disamping itu sarana dan prasarana sangat diperlukan untuk seluruh tempat wisata karena sangat mempengaruhi bagaimana kualitas tempat wisata itu sendiri. Akan tetapi akses jalan menuju ke Pantai tersebut masih sangat terbatas dan padat.

### **Standar Keamanan dan Kebersihan**

Upaya menjaga keamanan dalam kenyamanan pengunjung di pantai cemara sudah berjalan cukup baik dan sudah maksimal, ini terlihat dari adanya parkir yang dibuat oleh pemuda setempat supaya keamanan dari kendaraan milik pengunjung aman. Pengelolaan pantai cemara di Kabupaten Bireuen, ternyata tidak melibatkan dinas pariwisata sama sekali, hal ini keluar dari kebijakan dalam Peraturan Bupati Bireuen Nomor 10 Tahun 2021 tentang Objek Daya Tarik Wisata Kabupaten Bireuen dalam Bab V Pasal 6 Ayat 4 dan 6 mengenai sarana dan prasarana dan juga mengenai pengelolaan kawasan wisata yang memenuhi standar keamanan pada objek wisata.

Wawancara diatas dapat menggambarkan bahwa banyak pengunjung yang mengeluh akan penyediaan tempat sampah, dimana rata-rata pengunjung di pantai cemara adalah keluarga sehingga banyak sampah cemilan, pampers yang terkadang tidak mungkin dibuang ditempat sampah yang terbuat dari kardus. Artinya minimnya tempat sampah belum bisa di netralisirkan oleh pengelola di Pantai cemara. Seharusnya pantai cemara yang sudah diresmikan langsung kementerian menjadi pantai yang bisa dicontoh oleh pantai lainnya, akan tetapi dengan banyaknya sampah menyebabkan pantai cemara terlihat kotor. Kemudian sampah-sampah di pantai ini cukup banyak sekali, bahkan sampah bekas pampers anak yang

dibuang begitu saja dapat menimbulkan bau. Dan ini membuat pengunjung memilih milih tempat untuk bersantai.

Edward (2003) menyatakan bahwa sumber daya merupakan bagian dari implementator kebijakan, oleh karena itu dalam pelaksanaan kebijakan keberhasilan atau kegagalan tergantung pada implementatornya, kompetensi dari implementator berdampak pada efektifitas pelaksanaan kebijakan, namun apabila sumber daya tidak memenuhi baik dari segi kompetensi, keterampilan, kualitas, kuantitas. Hal ini berhubungan dengan hasil penelitian penulis, dimana belum sama sekali sesuai dengan sarana dan prasarana di pantai cemara, dimana masih banyak sampah-sampah terlihat, sehingga sampah tersebut meninggalkan bau tak sedap dan juga hal ini berdampak pada ekosistem sekitaran pantai.

### **Pendukung dan penghambat dalam Implementasi Kebijakan pengelolaan Wisata Pantai Cemara**

Berdasarkan hasil penelitian dalam pendukung dan penghambat berjalannya implementasi kebijakan pengelolaan pantai cemara, diketahui bahwa pantai cemara ini terhambat oleh sumber daya finansial. Dimana sumber daya finansial seperti biaya pembersihan sampah yang dilibatkan untuk pedagang. Sehingga dapat diartikan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum berjalan dengan cukup baik. Sedangkan dalam komunikasi juga belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan dinas pariwisata tidak dilibatkan dalam pengembangan penelitian ini. Hal ini sejalan dengan penelitian Tanod (2020) yang menyatakan bahwa sumber daya pengelola objek wisata milik desa belum memiliki kemampuan yang baik serta belum didukung dengan ketersediaan fasilitas penunjang dan anggaran untuk pengelola objek wisata menjadi lebih baik.

### **E. KESIMPULAN**

Implementasi kebijakan pengelolaan wisata Pantai Cemara di Gampong Lingka Kuta, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen, belum berjalan secara optimal. Berdasarkan empat dimensi implementasi kebijakan menurut Edwards III: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, ditemukan bahwa keterbatasan dana, sarana prasarana, serta koordinasi antarpihak menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan. Meskipun demikian, komitmen pengelola dan partisipasi masyarakat menunjukkan potensi positif bagi keberlanjutan pengelolaan wisata berbasis komunitas. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, diperlukan strategi penguatan komunikasi antaraktor, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan struktur kelembagaan yang lebih terintegrasi dan transparan. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan wisata Pantai Cemara tidak hanya bergantung pada dukungan kebijakan pemerintah, tetapi juga pada sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pengelola wisata dalam mewujudkan destinasi wisata yang berdaya saing dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Burhanuddin, S. (2008). *Perencanaan pariwisata perdesaan berbasis masyarakat*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Creswell, J. W. (2018). *Penelitian kualitatif & desain riset*. Yogyakarta: Pustaka Timur.
- Edwards, G. C. (2003). *Implementing public policy*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fajri, B., Rini, C. P., & Amaliyah, A. (2020). *Metodologi penelitian kuantitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Husni, F., Pahlevi, M. R., Harmaini, H., & Zikri, M. (2024). Urgensi pendidikan pariwisata dalam meningkatkan pengembangan wisata halal di Aceh. *Jurnal Ilmiah Guru Madrasah (JIGM)*, 3(1), 42–53. <https://doi.org/10.69548/jigm.v3i1.31>
- Lubis, S. (2007). *Kebijakan publik*. Bandung: Mandar Maju.
- Nurcholis, H. (2007). *Teori dan praktik pemerintahan dan otonomi daerah*. Jakarta: Gramedia.
- Nuryanti, P. (2009). *Manajemen aset pariwisata*. Bandung: Guardaya Intimarta.
- Pujiriyanto. (2020). *Teknologi untuk pengembangan media dan pembelajaran: Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Rijal, F., & Sandra, A. S. A. (2022). Penguatan nilai-nilai kearifan lokal dalam membangun moderasi beragama. *AR-RA'YU: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1–12.
- Syahrudin. (2019). *Implementasi kebijakan publik: Konsep, teori, dan studi kasus*. Bandung: Nusamedia.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yoeti, O. A. (2017). *Pengantar ilmu pariwisata (Edisi revisi)*. Bandung: Angkasa.
- Yuliamir, H. (2017). *Pengembangan daya tarik wisata: Desa wisata dan atraksi wisata guna*. Jakarta: Erlangga.